

**PROGRAM KERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
TAHUN 2018**

I. PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada tingkat banding di lingkungan Peradilan Agama, sesuai Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah:

- (1) Memeriksa dan mengadili ulang perkara yang dimohonkan banding;
- (2) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan;
- (3) Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya; dan
- (4) Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik dalam Penyelenggaraan Peradilan, baik teknis dan non teknis, di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang merupakan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, sudah tentunya akan tetap konsisten dan konsekuen mengikuti dan menegakkan kebijakan yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berupaya seoptimal mungkin melaksanakan tugas-tugas Peradilan dan memberikan pelayanan yang baik kepada publik demi meningkatkan martabat dan wibawa lembaga Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta secara khusus dan penyelenggaraan peradilan pada umumnya.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan tugas pokok di atas, sangat diperlukan adanya tata kerja dan management yang mantap, oleh karena itu perencanaan yang mantap dan realistis akan mempermudah penyelesaian tugas tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk itu perlu disusun

program kerja bersifat intern yang dapat dijadikan sebagai pedoman kerja sehari-hari setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam program kerja tahun sebelumnya. Program kerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2018 ini merupakan penjabaran umum dalam bentuk kerangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maupun Keputusan-Keputusan dan Edaran-Edaran yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Agama yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

B. VISI DAN MISI

a. VISI

Sesuai dengan Renstra PTA Jakarta Tahun 2015-2019, Visi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
YANG AGUNG”**

b. MISI

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Program Kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman setiap Aparatur dalam melaksanakan tugas di masing-masing bagian pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- 2) Memberi bobot dan kualitas partisipasi bagi aparat pelaksana dalam setiap aktivitas penyelesaian tugas-tugas kerja yang menjadi tanggung jawab sekaligus sebagai tahapan pencapaian tujuan/ sasaran Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada kurun waktu satu tahun.

- 3) Menciptakan kondisi dinamis bagi pengembangan kreatifitas serta memacu semangat kerja aparat pelaksana demi kepentingan memajukan pembangunan dibidang hukum dalam ruang lingkup Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

D. A R A H

Program Kerja ini diarahkan kepada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memberi bobot pada aparat pelaksana dalam menyelesaikan setiap tugas kerja, serta memberi dorongan/ motifasi yang positif kepada staf pelaksana sehingga terciptanya kondisi kerja yang sesuai dan seimbang serta berkualitas.

E. S T R A T E G I

1) Strategi Jangka Pendek

- a. Mengembangkan serta mengarahkan segenap potensi aparat pelaksana untuk menyelesaikan setiap tugas tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
- b. Menciptakan kondisi yang dinamis dan komunikatif agar pelaksanaan dapat mempertebal rasa percaya diri, semangat kebersamaan serta kesetikawanan dalam memikul tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
- c. Membina dan mengembangkan kemampuan teknis yustisial dan administrasi bagi hakim, pejabat kepaniteraan dan pejabat kesekretariatan guna memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

2) Strategi Jangka Menengah

- a. Melanjutkan strategi jangka pendek untuk mendekati kesempurnaan.
- b. Prioritas pengawasan terhadap pelaksanaan strategi jangka pendek untuk dievaluasi dan dikembangkan pada strategi jangka menengah.
- c. Menumbuhkan semangat kerja dengan menerapkan sistem disiplin kerja.

3) Strategi Jangka Panjang

- a. Merampungkan pelaksanaan strategi jangka pendek dan jangka menengah.
- b. Memacu kemampuan teknis aparat untuk tetap menyelesaikan setiap tugas kerja dengan tidak menunda setiap penyelesaian pekerjaan.

II. URAIAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA

1) Bidang Kepaniteraan

1. Panitera Muda Banding

- a. Program kerja di panitera muda banding yang meliputi :
 1. Meningkatkan pelayanan administrasi banding;
 - Membuat jadwal persidangan;
 2. Melaksanakan pengisian program pembaruan aplikasi informasi proses perkara;
 3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP ver. 3,5,1;
 4. Pembinaan teknis administrasi perkara;
 5. Meningkatkan penyelesaian perkara;
 6. Monitoring dan evaluasi pelaporan keadaan perkara banding melalui aplikasi Komdanas.
 7. Kerjasama dengan pihak Bank dalam rangka percepatan pembayaran biaya perkara banding yang dikirim dari Pengadilan Agama Pengaju dan pembayaran Hak Redaksi.
 8. Mengoptimalkan system IT dalam administrasi perkara dengan cara menggunakan aplikasi yang memudahkan tugas;
 9. Pendaftaran perkaratan banding secara *online* melalui aplikasi SIPP;
 10. Memaksimalkan implementasi SIPP dan sinkronisasi ke website satuan kerja masing-masing dan website Mahkamah Agung RI secara continue;
 11. Monitoring dan evaluasi pemantauan minutasasi perkara;
 12. Pelayanan *one day service* dengan menggunakan aplikasi informasi Keadaan Perkara Banding pada website Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dari penerimaan perkara banding sampai perkara itu selesai.

2. Panitera Muda Hukum

1. Mengusulkan dan melaksanakan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan perma yang berkaitan dengan tugas pokok peradilan agama tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kali;
2. Menjilid putusan/Salinan banding, kasasi sejak tahun 2009 sampai dengan 2017;
3. Meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SIWAS (System Informasi Pengawasan);
4. Mengusulkan digitalisasi arsip melalui aplikasi.

2) Bidang Kesekretariatan

A. Reformasi Birokrasi

Melanjutkan program reformasi birokrasi yang meliputi 8 area dengan melengkapi komponen-komponen yang belum ada.

B. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

- 1) Peningkatan Kesejahteraan PNS melalui pembinaan dan pengembangan pegawai dan SDM dengan melaksanakan mutasi pegawai yang telah menduduki jabatan selama 4 (empat) tahun atau lebih.
- 2) Analisa Jabatan dan Beban Kerja Sub Bagian Kepegawaian dan TI
- 3) Pengembangan Teknologi Informasi
 - a) Membuat aplikasi database kepegawaian
 - b) Penyeragaman Website Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta.

2. Sub Bagian Rencana, Program dan Anggaran

- 1) Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 2) Penyusunan Reviu Renstra PTA Jakarta tahun 2015-2019;
- 3) Merevisi Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2017 dan 2018;
- 4) Penyusunan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2019;
- 5) Merevisi Perjanjian Kinerja (PKT) Tahun 2017;
- 6) Penyusunan Perjanjian Kinerja (PKT) Tahun 2018;
- 7) Merevisi RKA K/L bendahara pengeluaran DIPA 04;

- 8) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ;
- 9) Penyusunan rencana anggaran tahun 2019 berdasarkan pagu indikatif DIPA 01 dan DIPA 04;
- 10) Penyusunan rencana anggaran tahun 2019 berdasarkan pagu definitif DIPA 01 dan DIPA 04;
- 11) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tahun 2020.

C. Bagian Umum dan Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

- 1) Penyempurnaan SOP subbag keuangan dan pelaporan;
- 2) Penyampaian realisasi anggaran setiap triwulan kepada pimpinan;
- 3) Mengoptimalkan pelaporan SPT Masa Pajak pegawai;
- 4) Mengoptimalkan pelaporan SPT Pajak Tahunan pegawai dengan menggunakan e-fin (Electronic Filling Identification Number);
- 5) Melaksanakan Monitoring dengan mengumpulkan Operator SAIBA dan SIMAK BMN untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

2. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

- 1) Mengoptimalkan tata persuratan kedinasan dengan baik, tertib, aman dengan menggunakan digitalisasi dan sesuai ketentuan;
- 2) Melakukan Penghapusan Inventaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang kondisinya sudah Rusak Berat.
- 3) Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2018 melalui portal LKPP.
- 4) Mempercepat terselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik, tertib dan sesuai RUP;
- 5) Finishing Inventaris Barang Milik Negara
- 6) Melanjutkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN yang belum ditetapkan.

D. Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

1. Pelaksanaan pengawasan bidang oleh Hakim Tinggi/ Hakim pengawas bidang masing-masing minimal setiap 3 bulan/ triwulan sekali dan dilaporkan kepada Ketua PTA melalui Wakil Ketua selaku koordinator pembinaan dan pengawasan.
2. Pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terhadap Pengadilan Agama se DKI Jakarta dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu tahun dengan materi berupa pembinaan dan pengawasan yang lebih konkrit serta disesuaikan dengan kebutuhan PA yang bersangkutan
3. Hakim Tinggi pengawas daerah melaksanakan pengawasan secara online setiap hari terhadap Pengadilan Agama daerah pengawasannya masing-masing.